

**REALITAS COST POLITIK PARTAI LAMA SEBAGAI PEMBANDING IMAJINASI
PARTAI PEMULA
(Studi Kasus: Partai Perindo dan PPP)**

Nony Natadia Ernel

Mahasiswa Program Magister Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
nonymatadiaernel@gmail.com

ABSTRAK

Kontestasi Pemilu Legislatif selalu menjadi tantangan nyata bagi tiap tiap kader partai yang berusaha memperoleh suara. Pada system proporsional terbuka seperti sekarang ini para kandidat dituntut untuk mempersiapkan diri mengahadi masyarakat secara langsung guna memperoleh simpati dan suara dari para pemilih karena menurut V.O. Key aka nada penilaian yang diberikan masyarakat melalui kapabilitas hingga dampak yang diberikan. Keuangan partai menjadi salah satu tingga yang menurut PPP kesiapan finansial akan dapat memberikan kontribusi terhadap calon yang memiliki potensi sosial namun minim akan biaya kampanye melalui kolektifitas wajib yang dibebankan kepada tiap tiap anggota legislative yang telah duduk dipusat maupun daerah, sebaliknya Partai Perindo optimis bahwa image politik yang disiapkan menjadi modal utama dalam kontestasi politik Pileg bahkan bantuan dapat dengan sendirinya hadir ketika partai siap menghadirkan para actor yang mumpuni

Keynote: Partai Politik, Keuangan, Legislatif

PENDAHULUAN

Dunia politik dimasa sekarang ini telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan berkaitan dengan hubungan antara kontestan politik dan kostituen.

Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat tidak lagi memikirkan ideology. Apapun yang menjadi ideology, Masyarakat saat ini lebih cenderung menggantikan ikatan yang lebih tradisional seperti ideology dengan hal yang lebih pragmatis, yaitu program yang ditawarkan oleh kontestan.

Atas dasar pola pikir masyarakat yang mulai kritis, masyarakat akan melihat persoalan yang terjadi ditengah tengah kehidupan mereka, pada bangsa, dan juga negara, permasalahan – permasalahan tersebut seperti masalah ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, maupun politik. Maka kemudian hal terpenting yang dilihat dari partai maupun kontestan oleh pemilih bagaimana kemampuan mereka untuk melaksanakan program kerja. Maka kemudian inilah yang membuat mobilisasi terhadap pemilih menjadi tinggi.

Proses demokrasi mulai dihelat di Indonesia seperti tahap pemilihan kepada daerah. KPU RI telah menetapkan tanggal pencoblosan pilkada serentak 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018 yang rencananya akan diikuti oleh 171 daerah, yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota, dengan 569 pendaftar yang diterima dan 11 pendaftar yang ditolak. Dari total pendatar yang diterima terdapat sebanyak 440 paslon yang mendaftar melalui jalur partai politik serta 129 pasangan calon yang mendaftar melalui jalur perseorangan atau independent.

Selanjutnya juga terdapat 15 partai yang ditetapkan sebagai peserta pemilu mendatang, kampanye pemilu akan berlangsung mulai 23 September hingga April 2019 dengan waktu pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta presiden yang akan dimulai pada tanggal 26 Maret 2018 hingga 21 September 2018.

Melalui perhelatan lima tahunan ini memberikan kesempatan pertarungan dalam demokrasi. Kader yang terbaik dari masing masing partai yang

kemudian diharapkan dapat pula memimpin dengan baik. Menurut V. O Key bahwa pemilih akan menetapkan pilihan dengan cara memberi penilaian kinerja dari kandidat, selain itu pemilih akan melihat dan menilai apakah seorang calon memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kinerja yang baik bagi dirinya atau daerahnya (trackrecord), serta mereka juga akan membandingkan antara figure terdahulu terhadap calon yang sedang mencalonkan diri saat ini.

Peran aktif partai politik selain menghadirkan program kerja yang sesuai dengan isu yang pantas untuk diangkat, juga menampilkan figure yang mumpuni untuk terjun kedalam kontestasi politik. Maka kemudian partai politik melakukan rekrutmen politik yang menurut Czudnowski (dalam Greenstein dan Polsby, 1975:155) proses ini merupakan proses dimana individu atau kelompok – kelompok individu dilibatkan dalam peran politik. Dengan adanya keterlibatan negara serta partai untuk mengatur siapa yang akan mencalonkan diri dan ikut dalam pilkada dibawah bendera partai politik maka menurut Pamungkas (2012) maka partai politik masuk kedalam pola-model eksklusif melalui adanya proses seleksi kandidat baik sebagai anggota eksekutif maupun legislatif dengan beberapa syarat tambahan diluar ketentuan negara dimana para individu dapat menominasikan diri ketika memenuhi persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan dan lainnya.

Kecenderung partai politik saat ini dalam mempersiapkan kontestan pilkada, pileg, dan pemilu sering melalui kegiatan penarikan calon dari luar partai, optimalisasi kader, dan juga menunggu para pendaftar yang membutuhkan partai dalam percalonan, untuk masuk kedalam daftar kepala yang tetap yang ditetapkan oleh KPU. Partai politik mencoba untuk melihat sosok calon bukan hanya dari aspek popularitas, elektabilitas, kedekatan sosial ditengah masyarakat, serta pula finansial. 2018 dengan hadirnya partai partai baru maka saat ini upaya untuk mendukung calon calon yang memiliki potensi

begitu gencar dilakukan, dan juga terus melakukan pendekatan kedalam masyarakat. Salah satu partai baru yang juga menjadi peserta Pemilu 2019 adalah partai Perindo. Bertolak belakang dengan persepsi bahwa kontestasi politik selalu lekat dengan keuangan. Perindo ingin meminimalisi penggunaan uang dalam melakukan proses kampanye, tantangan partai pendatang selama ini bagaimana partai politik untuk lebih dekat dalam masyarakat. Perindo tidak hanya membentuk figure politik dengan melakukan mobilisasi dan pengenalan diri secara up-down, namun juga partai Perindo melakukan pendekatan kepada elit politik agar dapat berkoalisi dalam pesta besar demokrasi nanti. Sampai dengan saat ini hasil real count yang dilakukan oleh KPU diseluruh daerah bahwa terdapat 17 pasangan calon yang diusung oleh partai Perindo , selain itu juga Perindo telah melakukan pendekatan dengan actor politik seperti kepada pemimpin negeri.

Disisi lain ada pula partai yang telah cukup lama berkecimpung dalam kegiatan perpolitikan Indonesia yang salah satunya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sejak 45 tahun telah melalui proses panjang dalam menghadapi pemilihan kepala daerah di Indonesia serta memahami bahwa seberapa besar cost politik yang perlu dikeluarkan dalam perhelatan kampanye, hingga menganggap bahwa kampanye tanpa cost hampir merupakan kemustahilan.

Oleh sebab itu dalam makalah ini penulis coba untuk melihat seperti apa imajinasi politik partai baru dan partai politik lama dalam memanfaatkan keuangan partai sebagai upaya proses penjangkaran suara ditengah tengah masyarakat.

TUJUAN PENELITIAN

Keuangan partai salah satu aspek penting yang diperlukan kandidat untuk mendulang suara dalam kontestasi politik. Dengan adanya keuangan partai

yang terbuka dan bersih akan pula berdampak pada rendahnya tindak money politic ditengah tengah masyarakat. Penelitian ini mencoba untuk melihat sejauh mana para penetingan keuangan partai yang diperlukan kandidat dalam upaya memenangkan suara apa pemilihan anggota legislative.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan teori partai politik dengan melakukan pengumpulan data melalui tinjauan teoritis melalui studi kepustakaan dan dilakukan dengan analisis yang didapat dari hasil wawancara dengan perwakilan Dewan Perwakilan Pusat yang berasal dari partai Perindo dan PPP .

LANDASAN TEORI

1. Partai Politik

Secara umum partai politik merupakan merupakan kelompok yang terorganisir yang anggota anggotanya memiliki orientasi, seperti nilai dan cita-cita yang sama. Dimana tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan menduduki politik, yang menggunakan konstitusional untuk melaksanakan kebijakan yang mereka miliki. Menurut Sigmund Neumann bahwa partai politik merupakan organisasi dari aktivitas aktivitas partai yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut kekuasaan rakyat atas dasar persaingan suatu golongan yang berbeda.

Kehadiran partai politik telah mengubah sirkulasi elit politik seperti sirkulasi yang tertutup keterbuka. Jabatan politik yang semua dianggap sebagai privillage kelompok tertentu menjadi jabatan yang dapat diakses semua kalangan masyarakat tanpa melihat kelas kelas sosial. Juga pengisian jabatan yang semula didasari dengan adanya otoritas dengan menggunakan agama atau wahyu tertentu, warisan, keturunan, lalu bergeser kearah kekuasaan yang memiliki saluran politik yang mencakup semua golongan.

Kehidupan demokrasi tidak pernah melepaskan partai politik sebagai acuan terhadap kesetaraan dan kebebasan, ketika kemudian partai harus kehilangan eksistensi maka kemungkinan yang terjadi menurut Almond dan Mas'ood dan MacAndrew adalah, pertama negara akan dikuasai rezim dinasti tradisional yang berdampak kekuasaan akan bersifat askriptif dan meletakkan supremasi di atasnya. Kedua, kekuasaan akan dipegang oleh militer, karena dianggap sebagai kelompok yang paling solid dan terorganisir dengan baik, namun adanya keterlibatan kekerasan didalamnya maka kultur ini akan dimasukkan kedalam masyarakat yang sebelumnya tidak pernah mengalaminya. Pemerintahan tanpa partai tersebut kemudian akan menjadi pemerintah konservatif, dan ketika tidak adanya partai dalam suatu rezim maka akan disebut sebagai rezim reaksioner (Huntington, 2004: 484) .

Sebagai sebuah organisasi kemudian partai politik memiliki entitas untuk bekerja berdasarkan prinsip prinsip tertentu diantaranya adanya kepemimpinan dan keanggotaan, divisionalisasi dan spesifikasi, melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan control serta adanya aturan main yang mengatur perilaku anggota dan organisasi, selain itu partai yang merupakan instrument politik maka mereka memperjuangkan nilai atau ideology yang merupakan kolektivitas kelompok individu kedalam wadah politik lalu kemudian menjadi corak khas pembeda antar tiap partai, juga perjuangan partai melalui penguasaan struktural kekuasaan maka kemudian partai akan berorientasi untuk mendapatkan mempertahankan memperluas dan mengelola kekuasaan. Terakhir pemilu yang adalah wadah mendapatkan kekuasaan maka orientasi partai yang memiliki perbedaan ideology dan cita akan mencari saran untuk mendapatkan kekuasaan yaitu melalui pemilu

2. Peran Dan Fungsi Partai Politik

Partai pada dasarnya dibentuk untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan

dengan mengajukan calon pada jabatan public. Mereka tidak dapat dilepaskan dari peran yang berkaitan dengan pengelolaan negara (Amal: 1999). Menurut Sartorini (1976) bahwa partai politik bukan terjadi secara tiba tiba namun partai politik memiliki fungsi, posisi, bobotnya tersendiri dalam suatu system politik yang tidak dirancang hanya dalam teori namun hadir atas dasar respon terhadap kejadian – kejadian yang ada. Dalam ilmu politik sering kali partai di kenal memiliki peranan penting terhadap masyarakat yaitu melakukan pendidikan politik, sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara, sebagai lembaga yang berusaha untuk mewakili kepentingan masyarakat, dan sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.

Disisi lain fungsi partai dianggap tidak selalu konstan dan cenderung mengalami transformasi. Berdasarkan konseptualisasi dari V.O. Key (1964) melihat kerangka partai kedalam tiga bagian yaitu partai di pemilih, partai sebagai sebuah organisasi, dan partai di institusi pemerintah. Abdul Mukhtie (2013) menjelaskan terdapat beberapa fungsi partai politik dalam demokrasi modern:

- a. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik, yaitu di satu pihak merumuskan kepentingan masyarakat untuk disampaikan serta diperjuangkan kepada pemerintah, selain itu menjelaskan dan menyebarkan kebijakan pemerintah kepada rakyat.
- b. Sebagai sarana sosialisasi politik, melalui kursi kursi pendidikan partai politik kemudian menanamkan nilai ideology dan loyalitas kepada negara dan partai.
- c. Partai politik merupakan sarana rekrutmen untuk mencari anggota baru lalu mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, serta upaya ini akan membantu terjaminnya

kuntinuitas dan kelestarian partai, juga sekaligus menyeleksi para calon pemimpin partai atau pemimpin negara.

- d. Partai politik merupakan sarana pengaturan konflik agar konflik dapat dikendalikan agar tidak mengoyak dan membahayakan eksistensi bangsa.

3. Sumber Penerimaan Keuangan Partai

Pemilu yang menghadirkan konstestasi antara partai politik yang telah menjadi metode lazim dalam pemilihan kepemimpinan dalam politik. Dalam prosesnya partai politik menyebarkan gagasan dan berkomunikasi dengan para konstituen mereka, kerennanya keuangan politik memegang peranan penting dalam demokrasi dimana pendanaan bisa memperkuat partai politik dan para kandidat. Dan tentu, penyediaan akses terhadap keuangan politik tanpa pamrih menjadi penting terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, yaitu meyakinkan masyarakat bahwa politik serta aktornya adalah pihak yang dapat dipercaya. Keuangan politik yang terbuka serta transparan berperan penting dalam pemberantasan korupsi dan meningkatkan kepercayaan public. Selain itu juga, transparansi dana juga dapat menyamaratakan konstestasi, serta mengungkapkan pengaruh dari eksternal, juga menyampaikan hambatan infiltrasi uang yang dilarang hukum, dan juga memaksa partai dan politisi untuk tunduk terhadap regulasi.

Untuk menghadapi berbagai tantangan keuangan politik banyak negara didunia telah memiliki regulasi namun sayangnya banyak dijumpai penerapan dan eksekusi regulasi belum dapat menjawab persoalan yang dihadapi. Permasalahan yang terjadi mulai dari infiltrasi uang yang dilarang oleh hukum yang merupakan hasil tindakan criminal sampai dengan tingginya cost politik electoral, selain itu juga diperparah dengan buruk design regulasi dan penegakan hukum yang lemah. Untuk menjawab persoalan ini perilaku dan

penyikapan internal partai terhadap uang adalah kunci dalam menjawab tantangan tersebut. Kurangnya dukungan finansial yang berasal dari akar-rumput terhadap partai, penyalahgunaan uang negara, lemahnya kehendak politik untuk membuat perubahan, hingga design regulasi, kesemua ini mempengaruhi bagaimana partai politik menyikapi dan memperlakukan keuangan politik.

Secara umum, sumber pendapatan partai politik dalam partai politik yang demokrasi berasal dari beberapa pihak pertama menurut Ramlan Subekti sumber penerimaan berasal dari internal partai, seperti iuran anggota dan sumbangan dari kader partai yang duduk dalam pemerintahan dan lembaga legislative. Kedua, berasal dari negara (APBN dan APBD) karena partai karena partai politik melaksanakan tugas tugas public, seperti pencalonan DPR dan DPRD, calon presiden, sampai kepala daerah. Maka karena partai politik pula sudah mempersiapkan persaingan yang yang adil antar partai maka bantuan pemerintah sebagai insentif bagi partai politik dalam menjalankan fungsinya. Ketiga berasal dari masyarakat baik perseorangan maupun organisasi sosial juga badan usaha swasta. Meski adanya keseimbangan antara bantuan dari kader, pemerintah, dan swasta guna meminimalisir kepentingan, namun negara demokrasi memberikan batasan terhadap pihak yang dizinkan untuk memberikan bantuan kepada partai politik tujuannya agar tidak terjadi ketergantungan dalam kontribusi juga kepentingan terhadap calon maupun partai politik.

4. Kampanye Dalam Perhelatan Pemilihan Eksekutif Dan Legislatif

Pemilihan umum tidak pernah terlepas dari kegiatan kampanye. Menurut pasal 1 ayat 26 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan umum DPR, DPD, DPRD disebutkan bahwa kampanye merupakan kegiatan kontestan yang berusaha untuk meyakinkan para pemilih dengan cara menawarkan visi, misi

dan program yang mereka miliki. Kampanye dalam (Cangara, 2011:223) bahwa adanya aktifitas komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain agar ia memiliki, sikap dan perilaku yang sesuai dengan kehendak atau keinginan untuk penyebaran atau juga memberian informasi.

Pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur semua jenis serta bentuk kampanye yang dapat dilakukan antaranya:

- a) Debat public/ debat terbuka antar calon
- b) Pemasaran alat peraga ditempat umum
- c) Penyebaran bahan kampanye kepada khalayak
- d) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- e) Penyiaran melalui radio dan atau televise
- f) Pertemuan terbatas
- g) Rapat umum
- h) Tatap muka

Dalam proses untuk mendapatkan dukungan masyarakat partai politik harus mempersiapkan diri untuk memperoleh calon yang memiliki popularitas serta elektabilitas yang menjadi kriteria agar masyarakat dapat memilih pada pelaksanaan pemilihan. Dalam proses kampanye ketika seseorang memiliki elektabilitas yang tinggi maka orang tersebut akan dikenal dengan baik secara luas dalam masyarakat. Maka oleh karena itu meski ada orang yang baik serta memiliki kinerja dalam bidang yang berhubungan dengan jabatan public namun tidak adanya wadah untuk memperkenalkan dirinya kepada public maka ia tidak mampu menjadi sosok yang elektabel. Sebaliknya, sering kali justru seseorang yang memiliki prestasi tinggi meski tidak dalam jabatan public tertentu, bisa jadi memiliki elektabilitas tinggi karena adanya mesin penggerak yang dapat meningkatkan elektabilitas ketengah masyarakat

karena ada yang mempopulerkan secara tepat.

APLIKASI TEORITIK

1. Pendanaan Sebagai Penopang Kampanye

Di dalam pemilu para kandidat dan partai politik bersaing untuk mendapatkan simpati pemilih. Pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena masyarakat harus memiliki kandidat dan partai yang dapat benar benar membawa aspirasi dan kepentingan kedalam formulasi kebijakan pemerintah nantinya. Sebagai suatu mekanisme Pemilu diharapkan dilaksanakan secara bebas serta setara karena system pemilu memberikan jaminan hak individu dan adanya system control bagi manajemen pelaksanaan pemilu. Dalam Ibrahim problem yang sering terjadi pada proses Pemilu adalah persoalan uang . Adanya kelaparan yang luar biasa ketika para kandidat maju kedalam Pemilu dan memelihara dukungan dari konstituen yang mengharuskan mereka membutuhkan ongkos yang besar. Makin lama biaya untuk kampanye, mobilisasi massa, memoles citra dan uang untuk membeli suara semakin mahal. Bahkan nasmacher (2001:18) mengingatkan bahaya dan dampak dari semakin mahalnya ongkos memenangi Pemilu.

Selanjutnya pada uraian akan memaparkan proses pendanaan yang berguna untuk menjaringan suara pada masa kampanye serta jika sesuai dengan aturan penerimaan dana kampanye maka bagaimana kemudian partai politik dapat mengoptimalkan keuangan partai agar dapat mendistribusikan program yang ingin ditawarkan kepada pemilih.

PEMBAHASAN

1. Perbandingan Pengelolaan Partai Perindo Dan PPP

Partai Perindo merupakan salah satu partai baru yang hadir dalam

perpolitikan Indonesia. Didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo Perindo hadir pada 7 Februari 2015. Perindo terus berupaya untuk memperkenalkan diri kepada khalayak dengan memanfaatkan media elektronik demi menunjang popularitas. Semula Perindo merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dibentuk pada Februari 2013. Hary bukan merupakan wajah baru dalam politik, karirnya dimulai sejak bergabung kedalam partai Nasdem sebagai Ketua Dewan Pakar pada 2011, kemudian setelah mengundurkan diri pada 2013, kemudian ia merapat pada Hanura pada 2014 sebagai cawapres mendampingi Wiranto pada Pemilu 2014.

Akibat suara yang tidak mencukupi pada Pileg ditahun yang sama hingga pasangan tersebut tidak dapat ikut dalam perhelatan pemilihan presiden maka kemudian Hary mengundurkan diri dari partai Hanura. Pada tahun 2019 nanti partai dengan nomor urut 9 ini menargetkan 10 persen perolehan suara. Lalu dalam proses menjaga stabilitas dan eksistensi di tiap daerah, dari hasil pengumpulan data melalui wawancara kepada salah satu anggota DPP partai Perindo yaitu Arya M Sinulingga selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Media Massa menyatakan bahwa sampai dengan saat ini partai Perindo melakukan marketing politik guna membranding partai yang inline dengan kebutuhan masyarakat. Isu-isu yang diangkat ketengah masyarakat seperti permasalahan lapangan kerja, dan kesejahteraan. Maka untuk mendapatkan empati dari masyarakat secara luas Perindo melakukan pendekatan dengan memfasilitasi "Gerobak Perindo" untuk membuka kesempatan usaha ditengah masyarakat menengah kebawah, "Pasar Perindo" guna memberikan masyarakat keringanan dalam mendapatkan sembako murah, juga bantuan nelayan, serta tani, dan bakti sosial ketengah masyarakat.

Arya menjelaskan bahwa upaya melahirkan kader yang baik dapat dilakukan dengan image politik yang baik pula, ini yang kemudian melahirkan kepercayaan dan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat baik

berpartisipasi sebagai kader, relawan, ataupun pendukung loyal. Maka dengan ini akan berdampak pada tingginya minat masyarakat untuk berpartisipasi sebagai anggota Perindo. Bahkan Arya menuturkan dampak tersebut akan menumbuhkan rasa solidaritas terhadap partai, para anggota DPD, dan DPC, bahkan tidak perlu lagi dibayar untuk mengurus kantor di tiap kantor kesekretariatan daerah tetapi mereka bahkan secara sukarela akan memberikan dukungan keuangan seperti sumbangan untuk menunjang keuangan partai.

Bagi Arya hingga saat ini keuangan partai Perindo sepenuhnya berasal dari sumbangan keanggotaan. Meski tidak secara eksplisit, ia menyebutkan sumbangan kepada partai oleh kader tidak memiliki batasan nominal maka jumlah sumbangan perorang dapat berjumlah ratusan hingga miliaran rupiah, dan tidak terdapat sumbangan dari perusahaan, maupun swasta, juga lembaga tertentu. Bagi Arya pemenuhan kebutuhan partai melalui sumbangan yang hanya diberikan oleh anggota cukup untuk membantu operasionalisasi partai dan baginya cukup rasional dimana ia menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini telah terdapat 600.000 anggota partai yang tersebar pada lebih dari 40.000 desa, 7000, kecamatan, dan 500 kabupaten maka sumbangan yang banyak akan mampu didapat. Arya yang juga berencana untuk menjadi salah satu calon anggota legislative dari Sumatera utara menyebutkan bahwa politik uang dapat diminimalisir ketika memiliki modal politik figure yang kuat, bahkan sering kali membuatnya mendapat bantuan ketika melakukan kunjungan masyarakat. Oleh sebab itu ia menambahkan bahwa Perindo tidak lagi perlu memberikan bantuan sumbangan dana bagi kadernya yang ingin maju dalam pemilu legislative karena menurutnya kader yang dimiliki Perindo adalah orang-orang yang telah siap secara finansial dan akan memiliki elektabilitas yang baik ketika pendekatan kepada masyarakat telah dilakukan sejak awal.

Disisi lain dengan apa yang menjadi pandangan perwakilan partai Perindo berkaitan dengan operasionalisasi partai, yang tidak memiliki kekhawatiran terhadap loyalitas anggota yang akan berdampak pada minimalisir penggunaan uang. Disisi lain Partai Pembangunan Indonesia (PPP) yang lahir sejak 5 Januari 1973 telah melalui proses panjang dalam perpolitikan yang demokrasi di Indonesia dengan mengikuti 9 kali pemilu dan berhasil melahirkan kader kader yang memiliki prestasi dibidang politik seperti, Aisyah Amini sebagai politisi perempuan yang cukup disegani pada era Orde Baru yang menyuarakan secara lantang menyangkut kepentingan rakyat dan kesetaraan gender, juga kader PPP Hamzah Haz yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden (2001 – 2004). Posisi strategis PPP pada tahun 1999 – 2004 terbukti dengan menempati urutan tiga besar dalam perolehan suara di DPR, kesuksesan prosisi strategis tersebut terbukti dimana PPP menjadi pelopor beberapa UU yang memperjuangkan nilai nilai keislaman dengan hadirnya UU Anti Pornografi, UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Haji, hingga UU Jaminan Produk Halal.

Namun pada pemilu 2009 merupakan periode terburuk PPP yang kehilangan 20 kursi dari 58 menjadi 35 kursi. Tetapi kemudian dapat bangkit kembali pada pemilu 2014 dengan berhasil menaikkan kursi dari 38 menjadi 39 kursi. Dengan semakin banyaknya sosok baru dalam kancah politik membuat PPP kesulitan menjaga popularitas partai dan memperoleh kader kader yang mumpuni. Dari hasil wawancara kepada Wakil Sekjen DPP PPP Bidang OKK Achmad Baidowi bahwa saat ini partai partai lama menghadapi berbagai tantangan untuk memperatahkan para pemilihnya kemudian untuk menjaga stabilitas partai untuk mendapatkan suara, Achmad mengatakan PPP terus melakukan konsolidasi hingga ditingkat desa dan kelurahan bahkan menurutnya ketua umum M Romahurmuziy (Gus Romi) hampir setiap dua hari melakukan konsolidasi diberbagai provinsi. Juga melakukan berbagai

pelatihan kader dan kader madya secara massif, secara serentak di seluruh daerah.

Achmad menuturkan untuk menjaga stabilitas partai ditiap daerah, keuangan partai merupakan hal yang tidak dapat dielakkan, besarnya pemenuhan sosialisasi ketiap daerah merupakan bagian dari tanggungjawab partai, bantuan dana kampanye pada kader yang mencalonkan diri sebagai anggota legislative maupun kepala daerah juga menjadi tanggung jawab partai agar kader yang memiliki potensi sosial namun tidak memiliki finansial yang cukup jangan sampai kalah. Selain itu ketika melakukan sosialisasi Achmad mengatakan uang yang dikeluarkan partai hingga mencapai 200 juta rupiah. Selain itu pengeluaran kepada pengurus partai ditiap DPC, DPD, adalah hal yang penting untuk menjaga agar PPP tetap solid didaerah. Maka sumber dana yang didapat partai ini berasal dari iuran anggota PPP di DPR RI yang ditarik sebesar 15juta rupiah atau lebih tiap bulannya, anggota DPRD ditingkat kota dan provinsi sebesar 2 hingga 5 juta rupiah, namun ia mengataan bahwa pengurus tidak diwajibkan memberikan sumbangan bahkan mereka menghindari iurang anggota. Achmad menyebut “mau mengurus dan loyal terhadap partai saja sudah syukur, boro boro mau dimintain duit pasti pada keluar” selain itu Achmad juga membenarkan adanya bantuan perusahaan, maupun swasta namun tidak menyebutkan siapa saja yang menjadi donatur. Menurutnya bahwa partai dengan kursi yang tidak dominan diparlemen akan kesulitan untuk mendapat dukungan finansial dari donatur, oleh sebab itu maka mereka terus melakukan pendekatan guna mendapat simpati oleh perusahaan donatur.

Selain itu dalam proses pencalonan diri pemilu legislative selain memberikan peluang kepada calon non partai sebanyak 40 persen melalui pendaftaran secara online. PPP juga terus mendukung kadernya untuk maju ditiap pemilihan bahkan PPP menyiapkan iuran anggaran wajib pilkada yang

dibebankan pula kepada perwakilan PPP di DPR sebesar 200 juta, DPRD Provinsi sebesar 50 juta, juga DPRD kota sebesar 15 juta meski bukan jumlah yang sedikit, sebagai contoh bantuan berbentuk moral dan materi diberikan kepada kader kader yang ikut dalam pemilihan kepala daerah seperti keikutsertaan kader pada Pilkada 2018 di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tambahan, bantuan juga diberikan dari pemerintah. Ia mengatakan bahwa uang merupakan alat yang tidak bisa dielakkan dalam tiap terselenggaranya Pileg, dan Pilkada, bahkan Pilpres. Ia merinci dana tersebut mulai dari dana survey untuk mengetahui kekuatan kader, mobilisasi relawan, timses, atribut kampanye, pelatihan panitia pengawas, hingga sosialisasi kepada masyarakat, serta ia tidak mengelak adanya politik uang untuk menjaring suara yang disebabkan oleh masyarakat yang semakin berfikir pragmatis, ini yang membuat partai menjadi lemah ketika harus menghadapi kader dari partai lainnya yang menggunakan politik uang dalam upaya menjaring suara. Menurut Achmad yang mengambil contoh dari laboratorium sosial yang dilakukan PAN, menemukan fenomena yang menarik. Objek penelitian tersebut dilakukan di dua desa yang berbeda. Desa A diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan desa selama 5 tahun tetapi ketika hari H pemilihan legislatif desa tersebut tidak diberikan bantuan apapun. Sedangkan desa B tidak diurus seperti desa A namun pada hari pemungutan suara diberikan serangan politik uang secara tiba – tiba. Pada hari tersebut ditemukan bahwa perolehan suara justru secara tinggi didapat di desa B sedangkan desa A hanya mendapatkan sedikit suara.

Dari ilustrasi tersebut Achmad menunjukkan bahwa saat ini masyarakat tidak lagi melihat popularitas, trackrecord, bahkan elektabilitas yang dimiliki calon maupun partai tetapi siapa yang dapat memberikan dampak keuntungan secara langsung terhadap mereka.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Partai politik memiliki peran penting terhadap proses partisipasi, pendidikan, politik, sosialisasi politik, hingga rekrutmen politik. Tingginya cost politik saat ini menjadi fenomena baru yang dihadapi partai politik dalam menjangkau suara dimasyarakat. Tidak hanya itu pembiayaan dalam partai politik juga memberikan peran penting untuk menjalankan fungsi organisasi dengan baik. Partai Perindo mengabaikan keuangan partai sebagai urgensi suatu organisasi menurut Perindo bahwa keuangan hanya sebagai penggerak program kerja bukan sesuatu yang utama karena yang terpenting adalah bagaimana membentuk figure politik partai maupun, kader.

Sebaliknya bagi PPP keuangan adalah salah satu motor penggerak partai. Dengan masyarakat yang semakin pragmatis menuntut partai politik untuk menyiapkan pendanaan yang lebih besar lagi agar mendapat suara yang maksimal. Maka inilah kemudian yang membuat partai harus secara konsisten menjaga keuangan PPP agar dapat membantu pergerakan organisasi di daerah, maupun dalam proses kampanye.

Dari hasil diatas menunjukkan Perindo sebagai partai baru belum memahami kondisi masyarakat yang hanya sedikit yang menjadi pemilih loyal tanpa kepentingan. Sedangkan PPP yang telah 45 tahun hadir pada perpolitikan Indonesia lebih realitis menghadapi masyarakat yang cenderung terus menunjukkan perubahan kepentingan. Inilah yang menjadi alasan kekhawatiran terhadap eksistensi partai yang tidak memiliki sumber keuangan yang kuat demi menjaga partai agar tetap mampu bersaing ditengah tengah masyarakat.

2. Saran

Fenomena masyarakat Indonesia yang semakin berfikir skeptis terhadap perpolitikan saat ini menjadi tantangan bagi partai politik. Dampak yang terjadi kemudian mengakibatkan kerugian yang dirasakan partai politik dengan cost politik yang semakin besar. Maka kemudian solusi yang dapat diberikan adalah kembali menguatkan regulasi kampanye agar tidak memerlukan biaya yang besar, adanya aturan batasan dana yang dikeluarkan selama masa kampanye, adanya aturan dilakukannya sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang dampak dari pilihan yang hanya melihat dari keuntungan sesaat (politik uang) namun dapat menghancurkan negara melalui korupsi demi membayar biaya yang keluar selama kampanye. Juga pemerintah harus memberikan pendidikan politik pada generasi muda demi untuk menciptakan pemilih yang lebih cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amal, Ichlasul. 1996. Teori - Teori Mutahir Partai Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Ballington, Julie, Elin Falgura, dkk. 2014. Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu. Edisi terjemah Djohan Rady. Swedia: International IDEA.
- Budiardjo, Miriam. 2005, Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Cangara, Hafied. 2011. Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Fadjar.Abdul Mukhtie. 2013. Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia. Malang: Sestara Pers.
- Firmanzah. 2007. Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Global Commission on Election, Democracy, and Security (2012), Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Election Worldwide. Stockholm/Geneva: International IDEA and Kofi Annan

Foundation

- Huntington, Samuel P. 2004. *Tertib Politik Pada Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Jr,V.O, Key. 1964. *Politic, Parties, and Pressure Groups*. New York: Crowell
- Pamungkas, Sigit.2012. *Partai Politik: Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism.
- Z, Ibrahim. Fahmi Badoh, Abdullah Dahlan. 2010. *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Jakarta. Indonesia Corruption Watch.

Situs Online

- Banwaslu. Diakses dari <http://www.bawaslu-dki.go.id/14/12/2015/menyoal-partisipasi-pemilih-pilkada/>, pada tanggal 23 Maret 2018
- Detiknews: Advertorial. 45 Tahun PPP Membangunan Indonesia. Diakses melalui <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-3800518/45-tahun-ppp-membangun-indonesia> pada 31 Maret 2018 jam 12.00 WIB
- Hakim, Rakhmat Nur. 2018. Partai Perindo dan Penantian 2019. Diakses dalam Kompas 30 Maret 2018 jam 21.00, pada laman: <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/08292081/partai-perindo-dan-penantiannya-di-pemilu-2019>
- Nadlir, Moh. 2018. Ini Tahapan dan Jadwal Lengkap 2019. Diakses melalui Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/08350381/ini-tahapan-dan-jadwal-lengkap-pemilu-2019> pada 24 Maret 2018,
- Partai Perindo. "17 Calon Kepala Daerah di Dukung Perindo Menang di Pilkada 2017". <https://partaiperindo.com/?p=29026> pada 24 Maret 2018 jam 07.20 WIB